



Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gianyar

I Made Wiranata ^{a,1,*}, Dewa Ayu Laksmi Dewi ^{b,2}, Rizky Maulana Saputra ^{c,3}

^a Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia

^c Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ imadewiranata@unud.ac.id; ² dewalaksmi@ub.ac.id; ³ rizkymaulana@uny.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

This study examines the influence of regional revenue on infrastructure development in Gianyar Regency from the perspective of regional financial law and governance. The study is motivated by the importance of regional fiscal capacity in supporting public development within the framework of regional autonomy, alongside persistent issues of development inequality and budget management effectiveness. The research aims to analyze the relationship between Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) and infrastructure development, as well as its legal governance implications for local government administration. This research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies related to regional financial policies and infrastructure development in Gianyar Regency. The findings reveal that increased regional revenue significantly affects infrastructure development, particularly in strategic sectors supporting economic and tourism activities. However, infrastructure development still faces challenges related to equitable distribution, transparency, and budget oversight effectiveness. This study argues that successful infrastructure development is determined not only by regional fiscal capacity but also by accountable, participatory, and equitable regional financial governance. The study contributes to the development of administrative law and regional financial law studies through a socio-legal approach to regional development policies.

Article History

Received 2026-02-28

Revised 2026-03-22

Accepted 2026-04-08

Published 2026-05-23

Keywords

Fiscal
Decentralization;
Regional Financial
Law;
Infrastructure
Development;
Good Governance;
Regional Autonomy

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam perspektif hukum tata kelola keuangan publik, pembangunan infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip welfare state melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkeadilan. Di berbagai negara, desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks (Mardiasmo, 2002). Dalam konteks negara berkembang, ketergantungan pembangunan infrastruktur terhadap kapasitas fiskal daerah menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas otonomi daerah, distribusi kewenangan, dan legitimasi kebijakan public (Saragih, 2003; Kuncoro, 2007).. Oleh sebab itu, hubungan antara pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur memiliki relevansi akademik maupun praktis dalam studi hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum keuangan daerah.

Dalam konteks Indonesia, implementasi otonomi daerah pasca reformasi telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan menentukan prioritas pembangunan. Kabupaten Gianyar sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Bali memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya aktivitas ekonomi tersebut mendorong kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama infrastruktur jalan, fasilitas publik, kawasan wisata, dan layanan dasar masyarakat. Namun demikian, dinamika pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Gianyar juga menghadapi tantangan berupa ketimpangan alokasi anggaran, fluktuasi pendapatan sektor pariwisata, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum keuangan daerah, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pendapatan daerah mampu memengaruhi arah dan efektivitas pembangunan infrastruktur serta bagaimana tata kelola kebijakan fiskal daerah dijalankan dalam kerangka regulasi otonomi daerah.

Kajian mengenai hubungan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai pendekatan. Sebagian besar penelitian menempatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan belanja modal sebagai variabel utama dalam menganalisis pembangunan daerah (Darwanto & Yustikasari, 2007; Yovita, 2011; Halim, 2004; Harianto & Adi, 2007; Kusnandar & Siswantoro, 2012; Wahyudi & Handayani, 2015). Penelitian lain menekankan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi regional (Prasetyo & Firdaus, 2009; Devita et al., 2014; Nugroho & Rohman, 2012). Di sisi lain, beberapa studi melihat pembangunan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pelayanan publik (Finuliyah & Khusaini, 2022; Setyowati & Himawan, 2022; Sihombing et al., 2023; Sunandar et al., 2023; Anas et al., 2022). Dalam kajian hukum administrasi dan kebijakan publik, pengelolaan keuangan daerah juga dipandang sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah (Adi, 2006). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pendekatan ekonomi kuantitatif dan belum banyak mengaitkan persoalan tersebut dengan analisis hukum tata kelola pemerintahan daerah secara lebih mendalam.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, khususnya mengenai bagaimana hubungan antara pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur dianalisis dalam perspektif hukum keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada pengaruh statistik antar variabel ekonomi tanpa menelaah dimensi normatif mengenai kewenangan pemerintah daerah, legalitas kebijakan anggaran, dan implikasi hukum dari pengelolaan pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengambil konteks Kabupaten Gianyar masih relatif terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik fiskal dan pembangunan yang unik akibat ketergantungannya terhadap sektor pariwisata. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh tata kelola hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan publik. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum keuangan daerah dengan menghubungkan aspek fiskal daerah dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan hukum administrasi dan kebijakan publik.

Secara metodologis, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar dengan menggunakan pendekatan

hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas pendapatan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sekaligus menelaah implikasi tata kelola hukumnya dalam konteks otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat memengaruhi efektivitas pembangunan publik di tingkat daerah.

Penelitian ini disusun ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas landasan konseptual mengenai pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, dan hukum keuangan daerah. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian ketiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaruh pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar. Adapun bagian terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pembangunan daerah berbasis tata kelola hukum yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mengkaji implementasi dan praktik kebijakan pembangunan infrastruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selama periode Januari hingga April 2026 (Kuncoro, 2007). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kabupaten Gianyar sebagai daerah dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pembangunan infrastruktur. Objek material dalam penelitian ini meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, sedangkan objek formal penelitian berfokus pada kajian hukum keuangan daerah dan hukum administrasi negara dalam kerangka otonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan yang terdiri atas pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, serta masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur daerah. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi tugas, pengalaman, dan keterlibatan informan dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan observasi terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur daerah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan pembangunan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), artikel jurnal ilmiah, serta literatur hukum dan kebijakan publik yang relevan dengan penelitian ini (Darwanto & Yustikasari, 2007; Ardhini & Handayani, 2011; Maimunah, 2006).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara kapasitas pendapatan daerah dan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis normatif untuk menelaah kesesuaian kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip-prinsip hukum keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah. Dalam proses analisis, penelitian memanfaatkan teori desentralisasi fiskal dan konsep good governance sebagai kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kewenangan pengelolaan keuangan daerah dijalankan dalam mendukung pembangunan publik (Adi, 2006). Kerangka tersebut digunakan untuk menghubungkan temuan empiris dengan persoalan hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan secara komprehensif pengaruh pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta empiris, regulasi hukum, dan teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, metodologi yang digunakan diharapkan mampu memberikan dasar analisis yang sistematis, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur dalam perspektif hukum keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah dan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gianyar

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan kapasitas pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir berkontribusi terhadap peningkatan belanja infrastruktur daerah, terutama pada sektor jalan, fasilitas publik, drainase, dan penataan kawasan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi instrumen utama dalam mendukung implementasi otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hasil wawancara dengan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi sumber dominan PAD yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang pelayanan publik dan kawasan wisata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur pendapatan daerah memiliki pengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam perspektif hukum keuangan daerah, pengelolaan PAD tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penganggaran, tetapi juga menyangkut prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Tabel 1. Kecenderungan Peningkatan PAD dan Belanja Infrastruktur Kabupaten Gianyar Selama Periode Penelitian.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Belanja Infrastruktur (Miliar Rupiah)
2022	845	510
2023	927	588
2024	1.035	663

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	Belanja Infrastruktur (Miliar Rupiah)
2025	1.148	741

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan PAD diikuti dengan peningkatan belanja infrastruktur daerah. Secara empiris, data ini memperkuat argumentasi bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki korelasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), Halim (2004), Harianto dan Adi (2007), Kusnandar dan Siswantoro (2012), serta Wahyudi dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung pandangan Prasetyo dan Firdaus (2009), serta Nugroho dan Rohman (2012) yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi regional.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu secara otomatis menghasilkan pembangunan infrastruktur yang merata. Beberapa informan menyatakan bahwa pembangunan masih terfokus pada kawasan strategis pariwisata, sementara wilayah pedesaan tertentu belum memperoleh prioritas pembangunan yang proporsional. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan distribusi kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tata Kelola Hukum Keuangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembangunan infrastruktur daerah tidak dapat dipisahkan dari tata kelola hukum keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa proses pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar telah mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan melalui dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD yang kemudian menjadi dasar legal pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam aspek efektivitas dan pengawasan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, pengawasan terhadap realisasi pembangunan infrastruktur masih menghadapi kendala berupa keterbatasan transparansi teknis pelaksanaan proyek dan ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan realisasi lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas formal dalam pengelolaan anggaran belum sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi kebijakan publik.

Dalam teori good governance, pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur masih relatif terbatas. Sebagian masyarakat hanya terlibat pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tetapi tidak memiliki akses optimal terhadap proses evaluasi pelaksanaan proyek. Akibatnya, kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pembangunan belum berjalan secara maksimal.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif hukum administrasi negara dan praktik implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, penelitian memperkuat argumentasi Adi (2006) bahwa efektivitas otonomi daerah tidak hanya

ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya publik.

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Keadilan Pembangunan

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar cenderung dipengaruhi oleh orientasi ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata. Sebagian besar proyek pembangunan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas kawasan wisata, pembangunan fasilitas publik penunjang pariwisata, dan penataan lingkungan ekonomi strategis. Secara ekonomi, kebijakan ini dianggap rasional karena sektor pariwisata menjadi sumber utama pendapatan daerah. Namun, dalam perspektif hukum pembangunan, orientasi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pembangunan antarwilayah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah desa mengalami keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan sistem drainase dibandingkan kawasan pusat wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip pemerataan pembangunan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih menekankan hubungan linear antara peningkatan PAD dan peningkatan pembangunan daerah (Yovita, 2011). Penelitian ini justru menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat menghasilkan ketimpangan pembangunan apabila tidak disertai kebijakan distribusi anggaran yang berkeadilan, sejalan dengan temuan Finuliyah dan Khusaini (2022) mengenai ketimpangan antarwilayah serta berbagai studi mengenai hubungan pembangunan infrastruktur dan PAD (Setyowati & Himawan, 2022; Sihombing et al., 2023; Sunandar et al., 2023; Anas et al., 2022).. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebagai persoalan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai isu hukum kebijakan publik dan keadilan pembangunan.

Dalam perspektif hukum keuangan publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah tidak cukup hanya dinilai berdasarkan efektivitas peningkatan PAD, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan socio-legal dalam studi hukum keuangan daerah dengan menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan ekonomi kuantitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa aspek legalitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan prinsip keadilan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan daerah.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk memperkuat sistem pengawasan pembangunan infrastruktur, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan distribusi pembangunan yang lebih merata agar peningkatan pendapatan daerah tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan ekonomi strategis tertentu.

Dalam konteks pengembangan hukum administrasi negara dan hukum keuangan daerah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pentingnya integrasi antara kapasitas fiskal daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga membuka ruang kajian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar, terutama dalam mendukung pembangunan fasilitas publik, infrastruktur jalan, dan kawasan strategis pariwisata. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan distribusi pembangunan yang merata. Pembangunan infrastruktur cenderung terpusat pada wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi tinggi, khususnya sektor pariwisata, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola hukum keuangan daerah, transparansi pengelolaan anggaran, dan efektivitas pengawasan kebijakan publik.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keuangan daerah dan hukum administrasi negara melalui pendekatan socio-legal yang menghubungkan aspek fiskal daerah dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pendekatan ekonomi kuantitatif dengan menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari persoalan hukum kebijakan publik dan keadilan pembangunan. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa legalitas formal dalam pengelolaan keuangan daerah harus disertai implementasi kebijakan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme pengawasan anggaran, meningkatkan transparansi pembangunan, dan memastikan distribusi pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada Kabupaten Gianyar dan belum melakukan perbandingan dengan daerah lain di Provinsi Bali maupun wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif dan memperluas analisis terhadap efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 1-24.
- Anas, S. D. P., Mustarin, B., & Aisyah, N. (2022). Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Bantaeng dalam pembangunan infrastruktur. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(3), 541-552. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i3.25163>

- Ardhini, A., & Handayani, N. (2011). Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 173-183.
- Darwanto, D., & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-25.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i2.2255>
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan asli daerah, belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.3>
- Halim, A. (2004). Pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI*, 13(2), 90-109.
- Hariato, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-26.
- Kuncoro, M. (2007). Otonomi daerah dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1-20.
- Kusnandar, D., & Siswanto, D. (2012). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 91-105.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 1-26.
- Mardiasmo, M. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(2), 147-162.
- Nugroho, I., & Rohman, A. (2012). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-14.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 15-27.
- Setyowati, L., & Himawan, L. A. (2022). Analisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 93-104. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11926>
- Sihombing, A., Sipayung, T., Damanik, S. E., & Nainggolan, P. (2023). Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 5(2), 79-89. <https://doi.org/10.36985/7h6dh009>
- Sunandar, A. A., Jannah, M., & Raya, F. (2023). Pengaruh pembangunan infrastruktur pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Serang tahun 2015-2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 120-131. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i2.113>

- Wahyudi, A., & Handayani, N. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8), 1-17.
- Yovita, F. M. (2011). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.